

Koneksi Politik dan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan dan Konstruksi

Tiska Ayu Mahardika, Diarany Sucahyati*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Jl. Rungkut Madya, Gunung Anyar, Kec. Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Email: ¹21013010030@student.upnjatim.ac.id, ²*diarany.s.ak@upnjatim.ac.id

Email Penulis Korespondensi: diarany.s.ak@upnjatim.ac.id

Submitted: 10/10/2025; Accepted: 26/10/2025; Published: 26/10/2025

Abstrak—Penghindaran pajak merupakan isu sentral dalam optimalisasi penerimaan negara. Sektor pertambangan dan konstruksi di Indonesia termasuk sektor yang rawan melakukan penghindaran pajak karena struktur bisnis yang kompleks dan keterlibatan dalam proyek pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019–2023. Koneksi politik diidentifikasi berdasarkan keberadaan Politically Exposed Person (PEP) dalam struktur dewan komisaris atau direksi. Penghindaran pajak diukur melalui rasio beban pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak (Effective Tax Rate/ETR). Sampel penelitian sebanyak 418 observasi ditentukan dengan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan perangkat lunak STATA 17.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap ETR dengan koefisien sebesar 0,090 pada taraf signifikansi 10%. Artinya, perusahaan dengan koneksi politik cenderung memiliki kepatuhan pajak yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan tanpa koneksi politik. Temuan ini mendukung pandangan bahwa koneksi politik dapat meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas fiskal perusahaan, bukan mendorong penghindaran pajak.

Kata Kunci: Koneksi Politik; Penghindaran Pajak; Effective Tax Rate; Sektor Pertambangan; Sektor Konstruksi

Abstract—Tax avoidance is a central issue in optimizing state revenue. The mining and construction sectors in Indonesia are highly vulnerable to tax avoidance due to complex business structures and involvement in government projects. This study aims to examine the effect of political connections on tax avoidance in mining and construction companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2019–2023 period. Political connections are identified based on the presence of Politically Exposed Persons (PEPs) on the board of commissioners or directors. Tax avoidance is measured using the ratio of income tax expense to profit before tax, known as the Effective Tax Rate (ETR). A total of 418 observations were selected using purposive sampling. The data were analyzed using panel data regression with control variables, processed through STATA 17.0 software. The results reveal that political connections have a positive and statistically significant effect on ETR, with a coefficient of 0.090 at the 10% significance level. This indicates that companies with political connections tend to exhibit higher tax compliance compared to those without such connections. These findings support the notion that political connections can enhance corporate fiscal oversight and accountability rather than encourage tax avoidance.

Keywords: Political Connections; Tax Avoidance; Effective Tax Rate; Mining Sector; Construction Sector

1. PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran fundamental dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, pajak memungkinkan pemerintah membiayai sektor-sektor vital seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang masing-masing berkontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas nasional (Tarumingkeng, 2024). Lebih dari sekadar alat pembiayaan, pajak juga berfungsi sebagai instrumen untuk memperbaiki struktur sosial melalui mekanisme redistribusi yang adil, misalnya dengan penerapan sistem pajak progresif yang mampu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat keadilan sosial (Sofiaturrohmah et al., 2025). Dengan demikian, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun, efektivitas sistem perpajakan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama terkait praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang marak terjadi pada sektor-sektor strategis seperti pertambangan dan konstruksi (Santoso & Firmansyah, 2024). Kedua sektor ini tidak hanya menjadi kontributor penting terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga memiliki karakteristik struktural yang menjadikannya lebih rentan terhadap praktik penghindaran pajak. Kompleksitas struktur kepemilikan perusahaan, transaksi lintas yurisdiksi, dan fleksibilitas dalam pengelolaan pembiayaan sering dimanfaatkan untuk menekan beban pajak melalui mekanisme seperti *transfer pricing* dan *thin capitalization* (Fitriana et al., 2022).

Dalam sektor pertambangan, perusahaan-perusahaan besar kerap menggunakan skema *tax shield* melalui pembiayaan utang guna menurunkan laba kena pajak. Selain itu, praktik *profit shifting* melalui anak perusahaan di negara *tax haven* juga menjadi fenomena umum. Studi terbaru menunjukkan bahwa perusahaan di sektor sumber daya alam, termasuk pertambangan, sangat rentan terhadap praktik tersebut, terutama ketika memiliki anak perusahaan di luar negeri yang berperan dalam rantai nilai ekspor (Wahyuningtias et al., 2024). Salah satu contoh konkret ditunjukkan oleh PT Adaro Energy Tbk yang diduga melakukan praktik transfer pricing dengan menjual batu bara ke anak perusahaan di Singapura dengan harga di bawah pasar, lalu menjual kembali ke pembeli akhir dengan harga lebih tinggi. Pola seperti ini bukan hanya mengurangi laba kena pajak di Indonesia, tetapi juga mencerminkan risiko penyalahgunaan struktur

afiliasi lintas negara dalam konteks penghindaran pajak. Keterkaitan pemilik utama perusahaan ini dengan pejabat publik memperkuat persepsi adanya pengaruh politik dalam praktik fiskal korporasi.

Sementara itu, di sektor konstruksi, hubungan erat antara perusahaan dan pemerintah dalam pelaksanaan proyek publik menciptakan peluang penyalahgunaan kebijakan fiskal. Praktik seperti yang terjadi pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk menunjukkan bagaimana rekayasa transaksi dan pembebanan fiktif dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak (Detiknews, 2023). Kasus korupsi *Supply Chain Financing* (SCF) perusahaan tersebut pada tahun 2023 juga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang manipulatif dapat berdampak langsung terhadap penerimaan pajak negara.

Secara makro, efektivitas penerimaan pajak di Indonesia memang menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Pada periode 2019–2023, rasio efektivitas penerimaan pajak meningkat dari 84,5% menjadi 95,9%, dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 102,5%. Namun demikian, peningkatan ini belum mencerminkan perbaikan struktural sistem perpajakan nasional. Berdasarkan data Kementerian Keuangan dan OECD, *tax ratio* Indonesia sepanjang 2020–2023 masih berada di kisaran 8,3%–10,4%, jauh di bawah rata-rata negara ASEAN lain seperti Vietnam (18,6%), Thailand (16,5%), dan Malaysia (13,8%). Perbedaan antara efektivitas penerimaan nominal dan *tax ratio* menunjukkan adanya *tax gap* yang signifikan selisih antara potensi dan realisasi penerimaan pajak.

Salah satu penyebab utama *tax gap* tersebut adalah praktik penghindaran pajak yang bersifat legal-formal, tetapi melemahkan asas keadilan fiskal dan efektivitas kebijakan pajak (Pratama & Muhammad, 2025). Rendahnya *tax ratio* menjadi indikator bahwa basis pajak Indonesia belum tergarap optimal akibat rendahnya kepatuhan, lemahnya pengawasan, serta maraknya praktik *aggressive tax planning*. Hal ini menegaskan pentingnya penelitian yang mengkaji determinan perilaku penghindaran pajak, terutama dalam konteks perusahaan yang memiliki hubungan erat dengan kekuasaan politik.

Koneksi politik (*political connection*) menjadi salah satu faktor penting yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan fiskal perusahaan. Perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan aktor politik baik melalui kepemilikan saham, posisi di manajemen, maupun hubungan sosial dan keluarga sering kali memperoleh akses istimewa terhadap kebijakan, regulasi, serta pengawasan fiskal (Rustiarini & Sudiartana, 2021). Dalam konteks tata kelola perusahaan di Indonesia, koneksi politik dapat memengaruhi strategi perpajakan melalui dua mekanisme yang berlawanan.

Di satu sisi, koneksi politik dapat memfasilitasi praktik *tax avoidance* melalui pengaruh terhadap penegakan regulasi atau pemanfaatan celah hukum (Apriliani & Wulandari, 2023). Perusahaan dengan hubungan politik kuat mungkin merasa lebih terlindungi dari risiko audit atau sanksi fiskal, sehingga lebih berani melakukan perencanaan pajak agresif. Di sisi lain, koneksi politik juga dapat menurunkan intensitas penghindaran pajak karena perusahaan tersebut berada dalam sorotan publik dan regulator, serta mempertimbangkan reputasi dan legitimasi sosial yang harus dijaga. (Khoirunnisa Asadan & Venusita, 2020; Sawitri et al., 2022).

Inkonsistensi hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya *research gap* yang signifikan terkait pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Sebagian studi menemukan bahwa koneksi politik meningkatkan *tax avoidance*, sementara sebagian lainnya menunjukkan efek sebaliknya. Perbedaan konteks, sektor industri, periode observasi, serta karakteristik institusional negara menjadi penyebab variasi temuan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan fokus pada konteks Indonesia pasca-pandemi, ketika reformasi fiskal dan tuntutan transparansi meningkat tajam.

Pemilihan sektor pertambangan dan konstruksi dalam penelitian ini didasarkan pada kontribusi strategis kedua sektor tersebut terhadap perekonomian nasional serta tingginya potensi praktik penghindaran pajak yang terjadi di dalamnya. Sektor pertambangan cenderung memiliki struktur kepemilikan yang kompleks dan keterkaitan erat dengan aktor politik, sementara sektor konstruksi memiliki kedekatan langsung dengan pengadaan proyek pemerintah dan pengelolaan insentif fiskal. Kedua sektor ini juga tergolong padat modal dan berisiko tinggi, yang menjadikannya relevan untuk dianalisis dalam konteks hubungan politik dan kepatuhan fiskal perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh koneksi politik terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019–2023. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi keberadaan koneksi politik yang tercermin melalui keterlibatan Politically Exposed Persons (PEP) dalam struktur dewan komisaris atau direksi perusahaan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat penghindaran pajak dengan menggunakan Effective Tax Rate (ETR) sebagai proksi kepatuhan fiskal, serta menguji sejauh mana koneksi politik memengaruhi nilai ETR yang dihasilkan.

Dalam analisisnya, penelitian ini juga mengikutsertakan sejumlah variabel kontrol yang terdiri atas profitabilitas (ROA), *Debt to Equity* (DER), *Managerial Ownership* (MOWN), ukuran perusahaan (SIZE), *Leverage* (LEV), Auditor BIG 4 (BIG4), *Board of Commissioners* (BOC), *Board of Director* (BOD), *The Proportion of Independent Board of Commissioners* (INBOC), *The Proportion of Independent Board of Director* (INBOD). Penggunaan variabel kontrol ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak tidak bias akibat faktor lain yang relevan. Pemilihan periode pasca-pandemi menjadi relevan untuk menangkap dinamika fiskal yang berubah serta peningkatan tekanan terhadap transparansi dan reformasi sistem perpajakan. Secara lebih luas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis terhadap literatur perpajakan, khususnya mengenai pengaruh faktor institusional seperti koneksi politik terhadap perilaku fiskal perusahaan. Di samping itu, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan yang strategis bagi otoritas pajak dalam merancang sistem pengawasan yang lebih adil, akuntabel, dan efektif untuk menekan praktik penghindaran pajak secara berkelanjutan.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upayanya memperkaya literatur perpajakan melalui pendekatan sektoral yang lebih spesifik, dengan fokus pada industri pertambangan dan konstruksi yang relatif kurang dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini memberikan pemahaman kontekstual mengenai bagaimana koneksi politik berperan dalam membentuk perilaku fiskal perusahaan di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan implikasi kebijakan bagi otoritas pajak dalam merancang strategi pengawasan yang lebih efektif dan adil, serta mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara struktural dan berkelanjutan.

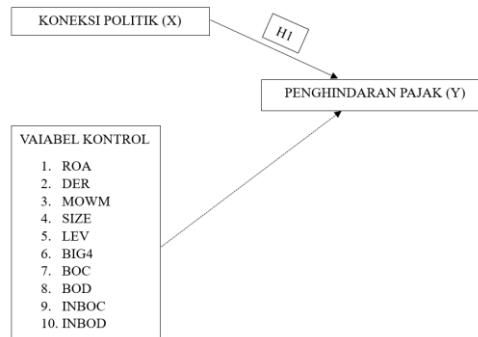
2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak. Pendekatan kuantitatif menekankan pada pengumpulan dan analisis data numerik guna menguji hipotesis dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan (*financial statements*) dan laporan tahunan (*annual reports*) perusahaan sektor pertambangan dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara variabel independen dan dependen secara objektif. Data panel digunakan untuk menangkap variasi antarperusahaan (*cross-section*) dan antarwaktu (*time-series*), sehingga estimasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan efisien dibandingkan data *time-series* atau *cross-section* tunggal.

2.2 Kerangka dan Hipotesis Penelitian

Kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan hubungan konseptual antara koneksi politik, penghindaran pajak, dan variabel kontrol. Perusahaan dengan koneksi politik berpotensi memengaruhi tingkat penghindaran pajak melalui akses terhadap regulasi dan pengawasan fiskal. Di sisi lain, koneksi politik juga dapat meningkatkan kepatuhan pajak karena pertimbangan reputasi dan eksposur publik yang lebih tinggi. Inkonsistensi hasil penelitian terdahulu menunjukkan perlunya pengujian empiris untuk menjembatani kesenjangan tersebut.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Perbedaan hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak belum sepenuhnya konsisten. Variasi temuan ini dapat disebabkan oleh perbedaan konteks perusahaan, sektor industri, periode waktu, mekanisme tata kelola, maupun karakteristik individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk menguji kembali pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak dengan mempertimbangkan variabel kontrol yang relevan. Dengan hasil yang beragam ini, hipotesis yang diajukan dapat disusun sebagai berikut:

H1: Koneksi politik berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.3 Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen, satu variabel independen, dan beberapa variabel kontrol. Definisi operasional variabel bertujuan mengubah konsep teoretis menjadi indikator terukur yang dapat dianalisis secara statistik.

Tabel 1. Pengukuran Variabel

Tipe Variabel	Nama Variabel	Sumber Data	Pengukuran Variabel
Variabel Independen	Koneksi Politik (PCON)	Laporan tahunan perusahaan, profil eksekutif	Nilai variabel dummy ditentukan berdasarkan keberadaan koneksi politik dalam perusahaan. Perusahaan dikategorikan memiliki koneksi politik (diberi nilai 1) apabila terdapat anggota direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham utama yang memenuhi kriteria sebagai <i>Politically Exposed Person (PEP)</i> , sebagaimana didefinisikan oleh Financial

Tipe Variabel	Nama Variabel	Sumber Data	Pengukuran Variabel
Variabel Dependen	Penghindaran Pajak (ETR)	Laporan keuangan perusahaan	Action Task Force ((FATF), 2022), yaitu individu yang dipercaya memegang jabatan publik penting, termasuk pejabat pemerintahan, militer, peradilan, atau eksekutif BUMN. Perusahaan tanpa indikator koneksi politik diberi nilai 0. Untuk mengukur sejauh mana beban pajak efektif yang dibayarkan oleh perusahaan, menggunakan rumus ETR: $ETR = \text{Beban pajak} / \text{Laba sebelum pajak}$ (Putra & Suhardianto, 2020).
Variabel Kontrol	Return of Asset (ROA)	Laporan keuangan perusahaan	Rumus: $\text{Laba bersih setelah pajak} / \text{Total aset}$ (Putra & Suhardianto, 2020).
	Debt to Equity Ratio (DER)	Laporan keuangan perusahaan	Rumus: $\text{Total utang} / \text{Total ekuitas}$ (Putra & Suhardianto, 2020).
	Managerial Ownership (MO)	Laporan tahunan perusahaan	Mengukur jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan sebagai persentase dari total saham: $\text{Managerial Ownership} = (\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Manajemen} / \text{Total Saham Beredar}) \times 100\%$ (Putra & Suhardianto, 2020).
	Ukuran perusahaan (SIZE)	Laporan keuangan perusahaan	Rumus: Logaritma natural dari total aset atau penjualan tahunan (Kurnianto & Pramana, 2023).
	Leverage (LEV)	Laporan keuangan perusahaan	Rumus: $\text{Total utang} / \text{Total aset}$ (Setyastrini et al., 2022).
	Auditor (BIG4)	Laporan keuangan perusahaan	Variabel dummy yang diberi nilai 1 jika auditor perusahaan adalah salah satu dari Big 4 (Deloitte, PwC, KPMG, atau EY), dan 0 jika bukan (Kurniasih et al., 2022).
	Board of Commissioners (BOC)	Laporan tahunan perusahaan	Mengacu pada total anggota dewan komisaris perusahaan (Putra & Suhardianto, 2020).
	Board of Director (BOD)	Laporan tahunan perusahaan	Mengacu pada total anggota dewan direksi perusahaan (Putra & Suhardianto, 2020).
	The proportion of Independent Board of Commissioners (INBOC)	Laporan tahunan perusahaan	Mengukur persentase komisaris independen dari total komisaris: $(\text{Jumlah komisaris independen} / \text{Total komisaris}) \times 100\%$ (Putra & Suhardianto, 2020).
	The proportion of Independent Board of Director (INBOD)	Laporan tahunan perusahaan	Mengukur persentase direksi independen dari total direksi: $(\text{Jumlah direksi independen} / \text{Total direksi}) \times 100\%$ (Putra & Suhardianto, 2020).

2.4 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan sektor pertambangan dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Periode ini dipilih untuk mencerminkan kondisi terkini pasca-pandemi serta memberikan rentang waktu observasi yang cukup panjang untuk analisis longitudinal. Sampel ditentukan menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pemilihan berdasarkan kriteria tertentu agar data relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut meliputi:

- Perusahaan terdaftar secara konsisten di BEI selama 2019–2023.
- Memiliki laporan keuangan dan tahunan yang lengkap.
- Memiliki informasi mengenai koneksi politik dan variabel kontrol yang relevan.

Dari 580 observasi awal, sebanyak 162 observasi dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria. Jumlah akhir sampel adalah 418 observasi. Penelitian ini menggunakan data panel tidak seimbang (*unbalanced panel*), di mana jumlah observasi berbeda tiap tahun namun tetap valid untuk analisis ekonometrika.

Tabel 2. Seleksi Sampel Penelitian

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023	Jumlah
Jumlah perusahaan dalam populasi, pertambangan dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023	116	116	116	116	116	580
Dikecualikan						

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023	Jumlah
Perusahaan yang tidak lengkap data keuangannya	42	38	29	26	27	162
Total Perusahaan yang menjadi sampel penelitian	74	78	87	90	89	418

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data arsip (*archival data*). Data arsip merupakan data sekunder yang diperoleh dari dokumen historis yang telah dipublikasikan secara resmi oleh lembaga atau perusahaan. Dalam penelitian ini, data arsip berupa laporan keuangan (*financial statements*) dan laporan tahunan (*annual reports*) perusahaan sektor pertambangan dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2023. Data tersebut dikumpulkan melalui akses ke situs resmi BEI (www.idx.co.id) dan situs resmi masing-masing perusahaan. Seluruh data yang diperoleh telah diaudit dan diverifikasi sehingga layak digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini.

2.6 Teknik Analisis dan Uji Hipotesis

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak STATA 17.0 dengan metode regresi data panel. Metode ini dipilih karena mampu menggabungkan dimensi *cross-section* (antarperusahaan) dan *time-series* (antarperiode), menghasilkan estimasi yang lebih efisien dan informatif. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$ETR_{i,t} = \alpha + \beta_1 PCON_{i,t} + \beta_2 ROA_{i,t} + \beta_3 DER_{i,t} + \beta_4 MO_{i,t} + \beta_5 SIZE_{i,t} + \beta_6 LEV_{i,t} + \beta_7 ROE_{i,t} + \beta_8 BIG4_{i,t} + \beta_9 BOC_{i,t} + \beta_{10} BOD_{i,t} + \beta_{11} INBOC_{i,t} + \beta_{12} INBOD_{i,t} + e \quad (1)$$

Langkah analisis mencakup:

- Statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data.
- Uji *Independent T-Test* untuk membandingkan perusahaan dengan dan tanpa koneksi politik.
- Uji Korelasi Spearman untuk menguji kekuatan hubungan awal antarvariabel dan mendeteksi multikolinearitas.
- Uji regresi data panel untuk menguji hipotesis utama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Hasil Penelitian

Analisis difokuskan pada perusahaan industri tambang serta konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2023, mencakup 418 data panel. Informasi dihimpun berulang tiap tahun pada entitas serupa. Observasi umumnya meningkat, kecuali 2023 menurun karena faktor laporan keuangan atau jumlah perusahaan. Panel Tabel 3 menampilkan distribusi serta klasifikasi koneksi politik.

Tabel 3. Distribusi Sampel Penelitian

Panel A. Distribusi Sampel Penelitian berdasarkan Industri dan Tahun						
Industri	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Pertambangan dan Konstruksi (SIC 1)	74	78	87	90	89	418
Panel B. Distribusi Sampel Penelitian berdasarkan Perusahaan yang Memiliki dan Tidak Memiliki Koneksi Politik						
Industri	Tidak memiliki koneksi politik		Memiliki koneksi politik		Total	
Pertambangan dan Konstruksi (SIC 1)	223		195		418	

3.1.1 Statistika Deskriptif

Tabel 4. Statistika Deskriptif

	Mean	Median	Min	Max
PCON	0.467	0.000	0.000	1.000
ETR	0.102	0.085	-2.050	1.645
ROA	3.869	2.135	-33.980	47.130
DER	1.519	0.800	-7.711	24.849
MOWN	0.135	0.000	0.000	25.440
SIZE	28.972	29.051	23.961	32.323
LEV	0.489	0.462	0.028	1.416
BIG4	0.275	0.000	0.000	1.000
BOC	4.167	4.000	2.000	16.000
BOD	4.553	4.000	2.000	15.000
INBOC	0.028	0.000	0.000	0.333

	Mean	Median	Min	Max
INBOD	0.420	0.400	0.000	0.667

Analisis statistik deskriptif yang ditampilkan pada Tabel 3 bertujuan memberikan gambaran awal terkait karakteristik data penelitian sebelum dilakukan uji lebih lanjut. Statistik deskriptif membantu peneliti memahami distribusi, nilai rata-rata, penyebaran, dan variasi variabel. Beberapa indikator yang dikaji mencerminkan kondisi keuangan, struktur kepemilikan, tata kelola, serta aspek relevan lain. Variabel PCON (koneksi politik) memperlihatkan nilai rata-rata 0,467 dengan median 0,000, serta rentang 0,000–1,000. Rata-rata yang mendekati 0,5 mengindikasikan sekitar 46,7% perusahaan sampel memiliki pengendali mayoritas, meski median nol menandakan sebagian besar tidak. Hal ini menunjukkan kepemilikan saham cenderung menyebar atau dispersed ownership.

ETR (Effective Tax Rate) mencatat rata-rata 0,102 dengan median 0,085, minimum -2,050 dan maksimum 1,645. Variasi lebar serta nilai negatif menandakan adanya kompensasi rugi fiskal, kredit pajak, maupun strategi penghindaran pajak. Tingkat ETR di bawah 100% menggambarkan efisiensi pajak yang tinggi akibat pengelolaan agresif. Variabel ROA (Return on Assets) memiliki rata-rata 3,869 dengan median 2,135, serta rentang -33,980 hingga 47,130. Data ini mencerminkan terdapat perusahaan dengan kerugian besar melebihi 30% aset, sementara lainnya mampu menghasilkan laba signifikan hingga 47%. Kondisi ini memperlihatkan variasi kinerja finansial yang lebar.

Ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan rata-rata 28,972 dan median 29,051 dengan sebaran 23,961–32,323. Nilai berbasis logaritma natural aset total ini memperlihatkan sampel berisi perusahaan beraset relatif besar dan homogen. Perbedaan antarperusahaan tidak terlalu ekstrem, sehingga menggambarkan karakteristik ukuran yang stabil pada periode penelitian.

3.1.2 Uji Karakteristik Perusahaan (Independent T-Test)

Analisis karakteristik perusahaan melalui uji *Independent T-Test* pada Tabel 4 bertujuan menilai ada tidaknya perbedaan signifikan antara perusahaan dengan kepemilikan pengendali (PCON = 1) dan tanpa kepemilikan pengendali (PCON = 0). Hasil pengujian menunjukkan adanya perbedaan nyata pada beberapa variabel utama, seperti tarif pajak efektif (ETR), ukuran perusahaan (SIZE), penggunaan auditor BIG4, jumlah dewan komisaris (BOC), jumlah direksi (BOD), serta proporsi komisaris independen (INBOC).

Pertama, pada variabel ETR (Effective Tax Rate), perusahaan yang memiliki koneksi politik (PCON = 1) menunjukkan rata-rata tarif pajak efektif sebesar 0,154, lebih tinggi dibandingkan perusahaan tanpa koneksi politik (PCON = 0) yang memiliki rata-rata sebesar 0,057. Perbedaan ini signifikan secara statistik pada tingkat 1%, dengan koefisien selisih sebesar -0,097 dan t-value sebesar -2,701. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan tanpa koneksi politik cenderung membayar pajak lebih rendah secara efektif, yang dapat mengindikasikan strategi perencanaan pajak yang lebih agresif atau efisiensi dalam struktur fiskal mereka, mungkin karena ketiadaan pengawasan politik atau tekanan reputasional.

Selanjutnya, variabel SIZE (ukuran perusahaan) juga menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Perusahaan dengan koneksi politik memiliki rata-rata ukuran sebesar 29,719, lebih besar dibandingkan perusahaan tanpa koneksi politik yang memiliki rata-rata sebesar 28,318. Perbedaan ini signifikan pada tingkat 1%, dengan koefisien sebesar -1,401 dan t-value sebesar -8,227. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan politik umumnya beroperasi pada skala yang lebih besar, yang mungkin mencerminkan kemudahan akses terhadap sumber daya strategis, perizinan, atau proyek-proyek pemerintah yang diperoleh melalui koneksi politik tersebut.

Selain itu, perusahaan dengan pengendali lebih banyak menggunakan jasa audit KAP BIG4 (mean = 0,354) dibandingkan tanpa pengendali (mean = 0,206), signifikan pada 1% dengan koefisien -0,148. Jumlah komisaris dan direksi juga lebih besar pada perusahaan dengan pengendali, mengindikasikan struktur organisasi yang lebih kompleks. Namun, proporsi komisaris independen lebih rendah (mean = 0,037 vs 0,020), signifikan pada 5%, mencerminkan lemahnya penerapan prinsip *good corporate governance*. Sementara itu, variabel ROA, DER, MOWN, LEV, dan INBOD tidak memperlihatkan perbedaan signifikan, sehingga kedua kelompok perusahaan memiliki kesamaan dalam profitabilitas, struktur modal, kepemilikan manajerial, leverage, dan proporsi direksi independen.

Tabel 5. Uji Karakteristik Perusahaan (Independent T-Test)

	PCON MEAN 0	PCON MEAN1	Coef	t-value
ETR	0.057	0.154	-0.097***	-2.701
ROA	3.489	4.303	-0.814	-0.699
DER	1.594	1.434	0.160	0.486
MOWN	0.090	0.185	-0.095	-0.769
SIZE	28.318	29.719	-1.401***	-8.227
LEV	0.474	0.505	-0.031	-1.158
BIG4	0.206	0.354	-0.148***	-3.409
BOC	3.242	5.226	-1.983***	-10.131
BOD	3.789	5.426	-1.636***	-9.188
INBOC	0.020	0.037	-0.017**	-2.267
INBOD	0.425	0.413	0.012	1.074

3.1.3 Uji Korelasi Spearman

Tabel 6. Uji Korelasi Spearman

	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
PCON	1.000											
ETR	0.131*** (0.007)	1.000										
ROA	0.034 (0.485)	0.224*** (0.000)	1.000									
DER	-0.024 (0.627)	- (0.001)	- (0.000)	1.000								
MOWN	0.038 (0.442)	0.017 (0.725)	-0.000 (1.000)	-0.025 (0.615)	1.000							
SIZE	0.374*** (0.000)	0.108** (0.027)	0.246*** (0.000)	0.093* (0.058)	- (0.012)	1.000						
LEV	0.057 (0.247)	-0.062 (0.206)	- (0.000)	0.348*** (0.000)	0.123** (0.188)	- (0.043)	1.000					
BIG4	0.165*** (0.001)	0.124** (0.011)	0.273*** (0.000)	-0.032 (0.511)	-0.049 (0.315)	0.416*** (0.000)	-0.043 (0.384)	1.000				
BOC	0.445*** (0.000)	0.046 (0.343)	0.207*** (0.000)	0.035 (0.480)	-0.059 (0.227)	0.552*** (0.000)	-0.094* (0.055)	0.178*** (0.000)	1.000			
BOD	0.411*** (0.000)	0.052 (0.288)	0.220*** (0.000)	0.093* (0.057)	-0.034 (0.485)	0.659*** (0.000)	-0.016 (0.751)	0.211*** (0.000)	0.594*** (0.000)	1.000		
INBOC	0.110** (0.024)	0.075 (0.125)	-0.026 (0.599)	0.024 (0.631)	0.004 (0.938)	0.022 (0.651)	-0.089* (0.070)	- (0.009)	0.014 (0.781)	0.053 (0.277)		
INBOD	-0.053 (0.284)	-0.020 (0.687)	-0.120** (0.014)	0.032 (0.511)	-0.023 (0.641)	0.021 (0.662)	0.069 (0.160)	0.064 (0.190)	- (0.003)	0.143*** (0.350)	0.108** (0.028)	1.000

p-values in parentheses

* $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

Uji Korelasi Spearman yang ditampilkan dalam tabel memberikan gambaran mengenai hubungan linear antarvariabel penelitian, baik yang berkaitan dengan karakteristik perusahaan, kepemilikan, maupun tata kelola. Nilai korelasi menunjukkan arah serta kekuatan hubungan, sedangkan angka dalam kurung mencerminkan tingkat signifikansi (*p-value*). Tanda *, **, dan *** digunakan untuk menunjukkan taraf signifikansi 10%, 5%, dan 1%. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi keterkaitan antarvariabel sekaligus menilai potensi multikolinearitas sebelum melanjutkan pada pengujian regresi.

Hasil menunjukkan bahwa variabel PCON (kepemilikan pengendali) berkorelasi positif signifikan dengan ETR (0.131***), SIZE (0.374***), BIG4 (0.165***), BOC (0.445***), BOD (0.411***), serta INBOC (0.110*). Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan pengendali cenderung memiliki tarif pajak lebih tinggi, ukuran lebih besar, menggunakan jasa auditor BIG4, serta mempunyai struktur dewan komisaris dan direksi lebih banyak. Meskipun korelasi dengan komisaris independen relatif kecil, hasil ini konsisten dengan uji Independent T-Test yang memperlihatkan dimana perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi umumnya lebih tinggi serta mempunyai tata kelola kompleks.

Variabel ETR memperlihatkan hubungan positif signifikan dengan ROA (0.224***) dan SIZE (0.108**), menunjukkan bahwa perusahaan besar dan lebih menguntungkan cenderung memiliki tarif pajak naik. Maka dapat dikaitkan bersama kapasitas fiskal yang lebih luas atau keterbatasan ruang untuk melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, ETR berkorelasi negatif dengan DER (-0.169***), yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat utang, semakin rendah beban pajaknya, sesuai teori pengaruh bunga terhadap pengurangan kewajiban pajak.

Profitabilitas (ROA) memiliki korelasi positif dengan BIG4 (0.124**), BOC (0.207***), dan BOD (0.220***), serta negatif dengan DER (-0.199***) dan LEV (-0.348***). Hal ini mencerminkan bahwa perusahaan yang lebih menguntungkan biasanya menggunakan auditor bereputasi, memiliki struktur dewan lebih besar, serta menjaga struktur modal lebih sehat dengan utang lebih rendah. Di sisi lain, DER menunjukkan korelasi positif dengan LEV (0.327***) dan SIZE (0.093*), tetapi negatif dengan ROA, yang menandakan ketergantungan berlebihan pada utang dapat menurunkan kinerja keuangan.

Kepemilikan manajerial (MOWN) tidak menunjukkan korelasi signifikan dengan variabel lain, menandakan perannya relatif kecil dalam membentuk karakteristik perusahaan pada sampel ini. Variabel SIZE memiliki hubungan positif dengan LEV (0.050), BIG4 (0.416***), BOC (0.552***), dan BOD (0.659***), mengindikasikan perusahaan besar cenderung memiliki tata kelola lebih kuat dan diaudit oleh auditor ternama. BIG4 hanya berhubungan positif dengan SIZE dan BOD (0.211***). Sementara itu, BOC dan BOD saling berkorelasi kuat (0.594***), tetapi keduanya negatif terhadap proporsi independen (INBOC -0.127**; INBOD -0.108**). Variabel INBOC dan INBOD secara umum tidak berhubungan kuat dengan variabel utama lain, meskipun INBOD berkorelasi negatif dengan ROA (-0.120*) dan BOD (-0.046), yang dapat mengindikasikan bahwa keberadaan unsur independen dalam dewan lebih berpengaruh pada dinamika tata kelola daripada kinerja keuangan secara langsung.

3.1.4 Uji Regresi Data Panel

Tabel 7. Uji Regresi Linear Berganda

	(1)
PCON	0.090*
	(1.70)
ROA	0.005**
	(2.37)
DER	-0.019
	(-1.58)
MOWN	0.005
	(1.17)
SIZE	0.009
	(0.58)
LEV	-0.081
	(-1.25)
BIG4	-0.004
	(-0.10)
BOC	-0.009
	(-1.35)
BOD	-0.004
	(-0.35)
INBOC	0.199
	(0.95)
INBOD	-0.040
	(-0.32)
_cons	0.088
	(0.20)
r2	0.220
N	418

Berdasarkan hasil perkiraan hasil regresi linier berganda yang ditampilkan pada Tabel 6, penelitian ini dimaksudkan untuk menilai pengaruh sejumlah variabel independen terhadap variabel dependen yaitu *Effective Tax Rate* (ETR). Nilai koefisien determinasi (R^2) diperoleh sebesar 0,220, yang mengindikasikan bahwa sekitar 22% variasi tarif pajak efektif dapat dijelaskan oleh model melalui variabel bebas yang digunakan, yakni kepemilikan pengendali (PCON), profitabilitas (ROA), struktur permodalan (DER), kepemilikan manajerial (MOWN), ukuran perusahaan (SIZE), leverage (LEV), kualitas audit (BIG4), struktur tata kelola (BOC dan BOD), serta keberadaan komisaris maupun direksi independen (INBOC dan INBOD). Sisanya, sebesar 78%, dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Secara parsial, hanya terdapat dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap ETR, yaitu PCON dan ROA. Variabel PCON memiliki koefisien positif sebesar 0,090 dan signifikan pada taraf 10% (ditandai dengan *), yang berarti bahwa keberadaan pemegang saham pengendali meningkatkan tarif pajak efektif. Dengan kata lain, perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi cenderung membayar pajak lebih tinggi dibandingkan perusahaan tanpa pengendali. Hal ini bisa dijelaskan oleh tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi pada perusahaan dengan pengendali, atau karena struktur kepemilikan yang terpusat menurunkan kecenderungan melakukan praktik penghindaran pajak.

Selanjutnya, variabel ROA (*Return on Assets*) berpengaruh positif signifikan terhadap ETR dengan koefisien 0,005 pada taraf signifikansi 5% (ditandai dengan **). Artinya, perusahaan dengan tingkat keuntungan yang lebih tinggi cenderung memiliki beban pajak efektif lebih besar. Temuan ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi laba yang dihasilkan, semakin besar pula kewajiban pajaknya. Selain itu, perusahaan yang sangat menguntungkan umumnya memiliki ruang terbatas untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif.

Sebaliknya, variabel-variabel lain seperti DER, MOWN, SIZE, LEV, BIG4, BOC, BOD, INBOC, dan INBOD tidak terbukti signifikan dalam memengaruhi ETR. Misalnya, DER memiliki koefisien negatif (-0,019) namun tidak signifikan, yang mengindikasikan bahwa rasio utang terhadap ekuitas belum berperan penting dalam menjelaskan variasi tarif pajak. Demikian pula, penggunaan auditor BIG4 juga tidak signifikan, sehingga kualitas auditor tidak memberikan pengaruh langsung terhadap tingkat kepatuhan fiskal perusahaan. Koefisien konstanta (_cons) bernilai 0,088, tetapi tidak signifikan, sehingga secara statistik tidak dapat dijadikan dasar interpretasi yang kuat. Jumlah observasi dalam model mencapai 418, yang relatif besar mendukung validitas analisis.

Secara keseluruhan, hasil regresi memperlihatkan bahwa tarif pajak efektif lebih dipengaruhi oleh kepemilikan pengendali dan profitabilitas, sementara faktor lain seperti struktur modal, ukuran perusahaan, tata kelola, maupun kualitas audit tidak menunjukkan pengaruh berarti dalam model ini. Implikasi temuan ini adalah pentingnya mempertimbangkan struktur kepemilikan dan tingkat laba dalam merumuskan kebijakan perpajakan maupun strategi kepatuhan fiskal perusahaan, mengingat keduanya memiliki peran dominan dalam menentukan besaran tarif pajak efektif.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis memperlihatkan bahwa koneksi politik yang direpresentasikan melalui kepemilikan pengendali (PCON) berpengaruh positif signifikan terhadap tarif pajak efektif (ETR). Artinya, perusahaan yang memiliki afiliasi politik cenderung membayar pajak dengan tingkat ETR lebih tinggi, sehingga relatif lebih patuh dan tidak melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif. Temuan ini sejalan dengan hasil uji Independent T-Test yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan rata-rata ETR antara perusahaan dengan dan tanpa koneksi politik, di mana perusahaan berafiliasi politik terbukti membayar pajak lebih besar.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan menggunakan *Political Connection Theory*, yang menyatakan bahwa perusahaan dengan hubungan politik memiliki dorongan untuk bersikap lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini dipicu oleh tingginya tingkat pengawasan dari publik maupun regulator terhadap perusahaan dengan afiliasi politik. Untuk menjaga legitimasi serta menghindari risiko reputasi yang merugikan, perusahaan-perusahaan tersebut memilih strategi kepatuhan fiskal lebih ketat dengan menunjukkan pembayaran pajak yang lebih disiplin. Dari perspektif *Agency Theory*, adanya koneksi politik juga dapat meminimalkan konflik keagungan antara manajer dan pemegang saham dalam kebijakan perpajakan. Manajemen cenderung menghindari praktik penghindaran pajak agresif karena potensi biaya politik yang ditimbulkan lebih besar daripada keuntungan jangka pendeknya. Dengan demikian, kepatuhan terhadap aturan perpajakan dapat dipandang sebagai strategi perusahaan untuk mempertahankan legitimasi baik dari sisi politik maupun ekonomi.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, hasil ini sejalan dengan penelitian Putra & Suhardianto (2020), Setyastrini et al. (2022), Primasari et al. (2024), serta Kurnianto & Pramana (2023) yang menunjukkan bahwa koneksi politik dapat meningkatkan kepatuhan fiskal dan menurunkan tingkat penghindaran pajak. Penelitian-penelitian tersebut menyatakan bahwa perusahaan dengan koneksi politik cenderung membayar pajak lebih tinggi karena berada dalam pengawasan publik dan regulator yang ketat serta mempertimbangkan risiko reputasi apabila terungkap melakukan penghindaran pajak.

Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Indarti & Widiatmoko (2023), Kurniasih et al. (2022); Rustiarini & Sudiartana (2021), dan Tee et al. (2022) yang menunjukkan bahwa koneksi politik justru meningkatkan praktik penghindaran pajak. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa koneksi politik dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi beban pajak melalui berbagai strategi, seperti memanfaatkan afiliasi *tax haven*, memperkuat pengaruh leverage, atau memanfaatkan perlindungan politik untuk menghindari risiko audit dan litigasi.

Perbedaan hasil dalam penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa hubungan antara koneksi politik dan penghindaran pajak bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti struktur kepemilikan, mekanisme tata kelola perusahaan, kualitas audit eksternal, karakteristik manajemen, serta konteks politik dan regulasi yang berlaku. Hasil penelitian ini memberikan bukti tambahan bahwa koneksi politik tidak selalu berimplikasi pada perilaku perpajakan yang sama di setiap perusahaan. Dalam konteks tertentu, koneksi politik dapat berperan sebagai sarana untuk meningkatkan legitimasi melalui kepatuhan fiskal, sedangkan dalam konteks lain, koneksi politik dapat dimanfaatkan secara strategis untuk menekan kewajiban pajak. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang hubungan ini perlu mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh koneksi politik terhadap perilaku penghindaran pajak.

3.2.2 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Penghindaran Pajak

Selain variabel utama, analisis ini turut menguji sejumlah variabel kontrol yang berpotensi memengaruhi praktik penghindaran pajak, antara lain profitabilitas (ROA), struktur pendanaan (DER, LEV), kepemilikan manajerial (MOWN), skala perusahaan (SIZE), kualitas audit eksternal (BIG4), serta mekanisme tata kelola korporasi (BOC, BOD, INBOC, INBOD). Berdasarkan hasil regresi, hanya variabel ROA yang menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap tarif pajak efektif (ETR). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat keuntungan perusahaan, semakin besar pula kewajiban pajak yang dipenuhi. Kondisi tersebut merefleksikan bahwa perusahaan dengan profit tinggi lebih cenderung taat membayar pajak, baik karena kapasitas keuangan yang memadai maupun dorongan untuk menjaga citra dan reputasi publik.

Temuan ini selaras dengan penelitian Kurnianto & Pramana (2023) yang mengungkapkan adanya keterkaitan antara profitabilitas dan praktik perpajakan, meskipun arah hubungannya berbeda. Dalam studi mereka, tingkat keuntungan justru mendorong praktik penghindaran pajak, sedangkan dalam penelitian ini profitabilitas meningkatkan kepatuhan fiskal. Perbedaan arah hubungan tersebut memperlihatkan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap kewajiban pajak bersifat kontekstual. Sebaliknya, Pujiningsih & Salsabyla (2022) inkonsistensi hasil antar penelitian. Hal ini mempertegas bahwa hubungan profitabilitas dengan kepatuhan pajak dapat sangat dipengaruhi oleh karakteristik sampel, periode observasi, maupun sektor industri yang diteliti.

Di sisi lain, variabel kontrol lainnya seperti DER, SIZE, LEV, BIG4, BOC, BOD, INBOC, dan INBOD tidak memperlihatkan pengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Artinya, baik struktur modal, skala perusahaan, kualitas auditor, maupun struktur tata kelola formal tidak secara langsung menjelaskan variasi tingkat kepatuhan pajak perusahaan. Temuan ini menggarisbawahi bahwa aspek struktural perusahaan tidak selalu menjadi faktor utama dalam memengaruhi keputusan manajemen terkait strategi perpajakan.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Luh et al. (2022) yang menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan tidak berdampak signifikan terhadap agresivitas pajak, serta riset Pujiningsih & Salsabyla (2022) yang menyatakan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh nyata terhadap praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks penelitian ini, faktor eksternal seperti regulasi pemerintah, reputasi perusahaan, dan keberadaan koneksi politik lebih berperan dalam membentuk perilaku perpajakan dibandingkan faktor internal seperti struktur modal ataupun mekanisme tata kelola formal.

3.2.3 Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak di Indonesia. Temuan bahwa koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap tarif pajak efektif (ETR) menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik cenderung lebih patuh terhadap kewajiban pajak dan tidak melakukan penghindaran pajak secara agresif. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan koneksi politik dapat mendorong perusahaan untuk menjaga kepatuhan pajak, baik karena alasan kehati-hatian, pengawasan yang lebih ketat, maupun untuk menjaga citra publik dan keberlanjutan usaha. Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak bersifat kontekstual. Dalam konteks Indonesia, koneksi politik justru berfungsi sebagai faktor yang meningkatkan kepatuhan pajak, berbeda dengan temuan di beberapa negara lain seperti Malaysia yang menunjukkan arah hubungan sebaliknya (Tee et al., 2022).

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian mengenai peran variabel kontrol seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, kualitas audit, dan tata kelola perusahaan. Dari keseluruhan variabel kontrol, hanya profitabilitas yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara variabel lain tidak berpengaruh. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa faktor internal berupa kinerja keuangan lebih dominan dalam memengaruhi kepatuhan pajak perusahaan dibandingkan faktor struktural atau tata kelola. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konteks spesifik dan karakteristik internal perusahaan dalam menganalisis perilaku kepatuhan pajak. Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi pemerintah dan otoritas pajak, temuan bahwa perusahaan dengan koneksi politik justru lebih patuh terhadap kewajiban pajak menunjukkan bahwa regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap perusahaan-perusahaan besar dan terafiliasi politik dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Otoritas pajak juga dapat memanfaatkan temuan ini untuk merancang kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran dengan mempertimbangkan karakteristik kepemilikan dan profitabilitas perusahaan. Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini memberikan pesan bahwa praktik penghindaran pajak yang terlalu agresif dapat menimbulkan risiko reputasi dan pengawasan yang lebih besar, terutama bagi perusahaan yang memiliki koneksi politik. Oleh karena itu, manajemen perlu menyeimbangkan strategi efisiensi pajak dengan upaya menjaga reputasi jangka panjang dan keberlanjutan usaha. Sedangkan bagi investor, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa perusahaan dengan koneksi politik dan profitabilitas tinggi cenderung memiliki kepatuhan pajak yang lebih baik. Hal ini dapat menjadi indikator positif dalam menilai tata kelola perusahaan serta risiko jangka panjang yang terkait dengan aspek kepatuhan fiskal. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi dengan mempertimbangkan faktor kepemilikan, profitabilitas, dan karakteristik tata kelola perusahaan.

4. KESIMPULAN

Melalui hasil analisis dan diskusi, studi ini menyatakan bahwa keterhubungan politik yang diprosikan melalui kepemilikan pengendali (PCON) berpengaruh positif signifikan terhadap tarif pajak efektif (ETR). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai relasi politik cenderung taat dalam memenuhi kewajiban pajak serta tidak melakukan penghindaran secara agresif. Selain itu, hanya profitabilitas (ROA) yang ditemukan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ETR, sedangkan variabel kontrol lainnya seperti DER, SIZE, reputasi auditor (BIG4), struktur dewan, serta kepemilikan manajerial tidak menunjukkan hubungan yang berarti. Secara menyeluruh, hasil kajian ini menawarkan sumbangsih bagi literatur dimana dampak koneksi politik terhadap penghindaran pajak tidak bersifat universal, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks kelembagaan dan politik di suatu negara. Dalam lingkungan Indonesia, koneksi politik justru berfungsi sebagai faktor yang meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan. Selain itu, kajian ini juga menegaskan hasil nyata terhadap profitabilitas memiliki kontribusi signifikan terhadap penentuan tingkat kepatuhan pajak, sementara mekanisme tata kelola dan struktur keuangan formal tidak terbukti memberikan pengaruh signifikan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang penting untuk diperhatikan dalam interpretasi hasil dan pengembangan penelitian di masa mendatang. Pertama, model regresi yang digunakan hanya mampu menjelaskan sebesar 22% variasi dalam penghindaran pajak, yang berarti sekitar 78% variasi dipengaruhi oleh faktor lain yang belum teridentifikasi dalam model ini. Kedua, pengukuran penghindaran pajak penelitian ini hanya bergantung pada Effective Tax Rate (ETR) sehingga diharapkan pada peneliti selanjutnya juga menggunakan beberapa indikator tambahan seperti *Book-Tax Differences* (BTD), dan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Ketiga, ruang lingkup penelitian hanya mencakup perusahaan publik di sektor pertambangan dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan secara menyeluruh terhadap perusahaan swasta atau BUMN yang memiliki karakteristik berbeda.



REFERENCES

- Financial Action Task Force (FATF). (2022). *Guidance on Politically Exposed Persons (Recommendation 12 and 22)*. Financial Action Task Force. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-pep-rec12-22.html>
- Apriliani, L., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Manajerial dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 40. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.902>
- Detiknews. (2023). Utang Proyek Fiktif di Balik Korupsi Dirut Waskita Karya. In *Detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-6696621/utang-proyek-fiktif-di-balik-korupsi-dirut-waskita-karya-destiawan-soewardjono>
- Fitriana, A. I., Febrianto, H. G., & Sunaryo, D. (2022). Determinan Manajemen Pajak Pada Perusahaan Aneka Industri. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 3(3), 350–358. <https://doi.org/10.47065/jbe.v3i3.1771>
- Indarti, M. G. K., & Widiatmoko, J. (2023). Political Connections and Tax Avoidance: Does Audit Quality Moderate The Relationship? *Jurnal Aset (Riset Akuntansi)*, 15(2), 295–306. <https://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/view/62523/25806>
- Khoirunnisa Asadan, N., & Venusita, L. (2020). Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.25273/inventory.v4i1.6296>
- Kurnianto, S., & Pramana, G. D. (2023). Pengaruh Ceo Yang Berpengalaman Bekerja Luar Negeri Terhadap Penghindaran Pajak. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 7(1), 128–149. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2023.v7.i1.5458>
- Kurniasih, L., Yusri, Y., & Hassan, A. F. S. (2022). Association of Tax Haven and Corporate Tax Avoidance: Does Political Connection Matter?. *International Journal of Economics and Management*, 16(SpecialIssue1), 1–13. <https://doi.org/10.47836/IJEAMSI.16.1.001>
- Luh, N., Setyastrini, P., & Prastiwi, A. (2022). Corporate Governance, Political Connection, Family Ownership and Tax Aggressiveness in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 17(1). <https://doi.org/10.24843/JIAB.2022.v17.i01.p010>
- Pratama, A., & Muhammad, K. (2025). Optimizing Tax Compliance: Understanding the Link Between Company Tax Administration and Tax Avoidance (A Survey of Public Companies in Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand for the 2022–2023 Period). *Economics*, 13(7). <https://doi.org/10.3390/economics13070194>
- Primasari, N. H., Faisal, F., & Mutmainah, S. (2024). Agresivitas Pajak Dan Koneksi Politik: Apakah Berperan Pada Keberlanjutan Perusahaan? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 15(1), 99–110. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2024.15.1.08>
- Pujiningsih, S., & Salsabyla, N. A. (2022). Relationship of Foreign Institutional Ownership and Management Incentives To Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 19(2), 244–262. <https://doi.org/10.21002/jaki.2022.12>
- Putra, Z. K. P., & Suhardianto, N. (2020). The Influence of Political Connection on Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22(2), 82–90. <https://doi.org/10.9744/jak.22.2.82-90>
- Rustiarini, N. W., & Sudartana, I. M. (2021). Board political connection and tax avoidance: Ownership structure as a moderating variable. *International Journal of Accounting Research*, 17(2), 122–137.
- Santoso, A. N. M. P., & Firmansyah, A. (2024). Penghindaran Pajak Dan Biaya Utang: Apakah Tatakelola Sudah Efektif Di Sektor Perindustrian? *SUBSTANSI Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan*, 8(2), 66–81.
- Sawitri, A. P., Alam, W. Y., & Dewi, F. A. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 8(1), 44–52.
- Setya Maharami, F., & Baroroh, N. (2019). Accounting Analysis Journal The Effects of Leverage, Executive Characters, and Institutional Ownership to Tax Avoidance With Political Connection as Moderation. *Accounting Analysis Journal*, 8(2), 81–87. <https://doi.org/10.15294/aaj.v8i2.30039>
- Setyastrini, N. L. P., Subekti, I., & Prastiwi, A. (2022). Corporate Governance, Political Connection, Family Ownership and Tax Aggressiveness in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 17(1), 146. <https://doi.org/10.24843/jiab.2022.v17.i01.p10>
- Sofiaturrohmah, S., Rosman, M. R., & Kasman, A. (2025). Keadilan Fiskal Dan Ekuitas Sosial: Pilar Daya Saing Ekonomi Makro Perdagangan Internasional. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 22(2), <https://doi.org/10.46730/jiana.v22i3.8226>
- Tarumingkeng, R. C. (2024). *Ekonomi Hijau: Integrasi Kebijakan Makroekonomi Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Rudyct e-Press
- Tee, C. M., Teoh, T. T. M., & Hooy, C. W. (2022). Political Connection Types and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Malaysia. *Malaysian Journal of Economic Studies*, 59(2), 199–220. <https://doi.org/10.22452/MJES.vol59no2.2>
- Wahyuningtias, T., Athariq, S. P., Nurkhasanah, K. I., & Aliza, S. (2024). Analisis Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Perusahaan Multinasional (Studi Kasus Pt Adaro Energy Tbk). *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (BIJAK)*, 8(11), 320–326. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/j.bijak.v7i1.15020>